

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 487

TAHUN : 2000

SERI : D

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

**PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERANG**

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, perlu adanya program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, perlu menetapkan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 ) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999, tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan .....

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang ( Lembaran Daerah Nomor 466 Tahun 2000 ) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Propinsi adalah Kepala Daerah Propinsi beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Serang.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD.

12. Pengawasan .....

12. Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah Rencana Operasional Tahunan dari Program Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target Pendapatan dan batas tertinggi Belanja Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dari Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target Pendapatan dan batas tertinggi Belanja Desa.

## B A B II

### TATA CARA PENYUSUNAN APBD

#### Bagian Pertama

#### Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

##### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama BPD Setiap menjelang Tahun Anggaran Baru menyusun APB Desa dengan mengacu kepada APBD Kabupaten.
- (2) Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai pada bulan Januari.

#### Bagian Kedua

#### Bentuk dan Susunan APB Desa

##### Pasal 3

- (1) APB Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
- (3) Bagian Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Penerimaan dari sisa lebih perhitungan APB Desa tahun lalu ;
  - b. Penerimaan dari Pendapatan Asli Desa ;
  - c. Penerimaan dari Bantuan Pemerintah Kabupaten ;
  - d. Penerimaan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
  - e. Penerimaan dari Sumbangan pihak ketiga ;
  - f. Penerimaan dari Pinjaman Desa.
- (4) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
  - a. Belanja Pegawai ;
  - b. Belanja Barang ;
  - c. Belanja Pemeliharaan ;

d. Belanja .....

- d. Belanja Perjalanan Dinas ;
  - e. Angsuran Pinjaman ;
  - f. Belanja tidak terduga.
- (5) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
- a. Pengeluaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa ;
  - b. Pengeluaran Pembangunan Prasarana Produksi ;
  - c. Pengeluaran Pembangunan Prasarana Perhubungan ;
  - d. Pengeluaran Pembangunan Prasarana Agama dan Sosial Budaya ;
  - e. Pengeluaran Pembangunan Prasarana Pemasaran.

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan APB Desa meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan APB Desa

#### Pasal 5

- (1) APB Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan peraturan Desa, selambat-lambanya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan.

#### Pasal 6

Bentuk Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### TATA USAHA KEUANGAN DESA

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.
- (2) Bendaharawan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Kepala Urusan Keuangan Desa.

#### Pasal 8

- (1) Bendaharawan Desa menyetorkan untuk setiap jenis penerimaan ke Kas Desa atau Lembaga yang ditunjuk sebagai Kas Desa oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.

(2) Setiap .....

- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran Anggaran dicatat oleh Bendaharawan Desa dan dilaporkan satu minggu sekali kepada Kepala Desa.
- (3) Bendaharawan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

#### BAB IV

#### MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA

##### Pasal 9

- (1) Bendaharawan Desa diangkat oleh Kepala Desa atas Persetujuan BPD.
- (2) Pengangkatan Bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Jujur ;
  - b. Tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD ;
  - c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP ;
  - d. Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Bendaharawan.

#### BAB V

#### PERUBAHAN APB DESA

##### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perubahan baik penerimaan dan pengeluaran keuangan yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan, maka Kepala Desa membuat perubahan APB Desa.
- (2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan APB Desa yang tidak menyangkut perubahan APBD Kabupaten, maka sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten.

##### Pasal 11

Bentuk Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### BAB VI

#### PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA

##### Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (3) Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VII .....

B A B VII  
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN APB DESA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan APB Desa dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana Program/kegiatan Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan APB Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Setiap pengeluaran Keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 15

BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

B A B VIII  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN  
TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR)

Pasal 16

- (1) Tuntutan Perbendaharaan dapat dilakukan terhadap Bendaharawan Desa, apabila dalam pengelolaan Keuangan Desa terdapat kekurangan Perbendaharaan.
- (2) Kepada Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diharuskan mengganti kerugian.

Pasal 17

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dapat dilakukan terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas lainnya dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan yang melakukan perbuatan pelanggaran yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kerugian terhadap perbendaharaan Desa.
- (2) Badan yang mengurus Tuntutan Ganti Rugi adalah BPD.

B A B IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak disahkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g

pada tanggal 25 September 2000

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

B U N Y A M I N

Diundangkan Di S e r a n g

pada tanggal 30 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2000 NOMOR 487

## LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 19 Tahun 2000

Tanggal : 25 September 2000

Tentang : Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

**BENTUK PERATURAN DESA MENGENAI APB DESA**

PERATURAN DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN SERANG  
 NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

Menimbang : bahwa sesuai dengan pasal ..... ayat (..) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor .... Tahun ....., Anggaran Pendapatan dan belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang ..... dst ;  
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang .... dst ;  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang ..... dst ;  
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang .....dst ;  
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang ..... dst ;  
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor ..... Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (BPD) ;  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor ..... Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ;  
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor ..... Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Desa ;  
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor ..... Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;  
 10. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .... Tahun Anggaran .....

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... TAHUN .....

Pasal 1 .....

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp. .... yang terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp. ....
- b. BELANJA :
- Belanja Rutin Rp. ....
  - Belanja Pembangunan Rp. ....
  - Jumlah seluruhnya Rp. ....

## Pasal 2

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Desa ini.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran belanja rutin adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Desa ini.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai anggaran belanja pembangunan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa.

## Pasal 4

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

( ..... )

LAMPIRAN I PERATURAN DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN .....  
 TANGGAL .....

CONTOH URAIAN PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	J U M L A H	KETERANGAN
1	2	3	4
1.1	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu	Rp. ....	.....
1.2	Pos Penerimaan PAD	Rp. ....	.....
1.2.1	Tanah Kas Desa	Rp. ....	.....
1.2.2	Pasar/Kios Desa	Rp. ....	.....
1.2.3	Pemandian Umum	Rp. ....	.....
1.2.4	Obyek Rekreasi	Rp. ....	.....
1.2.5	Bangunan Milik Desa	Rp. ....	.....
1.2.6	Kekayaan Desa Lainnya	Rp. ....	.....
1.2.7	Swadaya & Partisipasi Masy.	Rp. ....	.....
1.2.8	Gotong Royong Masy.	Rp. ....	.....
1.2.9	Pungutan Desa terdiri dari :	Rp. ....	.....
1.2.9.1	Pungutan .....	Rp. ....	.....
1.2.9.2	Pungutan .....	Rp. ....	.....
1.2.10	Hasil Usaha Desa	Rp. ....	.....
1.2.10.1	Lumbung Desa	Rp. ....	.....
1.2.10.2	Pabrik Bata	Rp. ....	.....
1.2.10.3	.....	Rp. ....	.....
1.3	Pos Pemberian Pemerintah Pusat	Rp. ....	.....
1.3.1	Tunjangan Penghasilan	Rp. ....	.....
1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa	Rp. ....	.....
1.3.3	Hadiah Lomba Desa	Rp. ....	.....
1.3.4	.....	Rp. ....	.....
1.4	Pos Pemberian Pemerintah Propinsi	Rp. ....	.....
1.4.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Prop.	Rp. ....	.....
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Prop.	Rp. ....	.....
1.4.3	Sumbangan dan Bantuan lain	Rp. ....	.....
1.5	Pos Pemberian Pemerintah Kabupaten	Rp. ....	.....
1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab.	Rp. ....	.....
1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Kab.	Rp. ....	.....
1.5.3	Sumbangan dan Bantuan lain	Rp. ....	.....

1	2	3	4
1.6	Pos lain-lain pendapatan	Rp. ....	.....
1.6.1	.....	Rp. ....	.....
1.6.2	.....	Rp. ....	.....
1.6.3	.....	Rp. ....	.....
	J U M L A H	Rp. ....	.....

KEPALA DESA .....

( ..... )

LAMPIRAN II PERATURAN DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN .....  
 TANGGAL .....

CONTOH URAIAN BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	J U M L A H	KETERANGAN
1	2	3	4
2R.1	Pos Belanja Pegawai	Rp. ....	.....
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa	Rp. ....	.....
2R.1.2	Penghasilan Sekdes	Rp. ....	.....
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan	Rp. ....	.....
2R.1.4	Penghasilan Kepala Seksi	Rp. ....	.....
2R.1.5	Penghasilan Kepala Kampung	Rp. ....	.....
2R.1.6	Honor .....	Rp. ....	.....
2R.1.7	Honor .....	Rp. ....	.....
2R.2	Pos Belanja Barang		
2R.2.1	Pembiayaan ATK	Rp. ....	.....
2R.2.2	Perlengkapan/alat kantor	Rp. ....	.....
2R.2.3	.....	Rp. ....	.....
2R.2.4	.....	Rp. ....	.....
2R.3	Biaya Pemeliharaan	Rp. ....	.....
2R.3.1	Pengecatan Gedung Kantor	Rp. ....	.....
2R.3.2	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa	Rp. ....	.....
2R.3.3	.....		
2R.4	Pos Biaya Perjalanan		
2R.4.1	Perjalanan Dinas ke .....	Rp. ....	.....
2R.4.2	.....	Rp. ....	.....
2R.4.3	.....	Rp. ....	.....
2R.5	Pos Belanja lain-lain		
2R.5.1	.....	Rp. ....	.....
2R.5.2	.....	Rp. ....	.....
2R.5.3	.....	Rp. ....	.....
2R.6	Pos Pengeluaran Tidak Terduga	Rp. ....	.....
	J U M L A H	Rp. ....	.....

KEPALA DESA .....

( ..... )

LAMPIRAN III PERATURAN DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN .....  
 TANGGAL .....

CONTOH URAIAN BELANJA PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	J U M L A H	KETERANGAN
1	2	3	4
2P.1	Pos Prasarana Pemdes	Rp. ....	.....
2P.1.1	Gedung Kantor	Rp. ....	.....
2P.1.2	Aula	Rp. ....	.....
2P.1.3	.....	Rp. ....	.....
2P.1.4	.....	Rp. ....	.....
2P.2	Pos Sarana Produksi	Rp. ....	.....
2P.2.1	Pembuatan Dam	Rp. ....	.....
2P.2.2	Pembuatan Saluran Air	Rp. ....	.....
2P.2.3	.....	Rp. ....	.....
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan	Rp. ....	.....
2P.3.1	Pembangunan Jalan	Rp. ....	.....
2P.3.2	Pembangunan Jembatan	Rp. ....	.....
2P.3.3	.....	Rp. ....	.....
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran	Rp. ....	.....
2P.4.1	Pembangunan Pasar di .....	Rp. ....	.....
2P.4.2	Pembangunan Kios di .....	Rp. ....	.....
2P.4.3	.....	Rp. ....	.....
2P.5	Pos Prasarana Sosial	Rp. ....	.....
2P.5.1	Pembangunan Mesjid di .....	Rp. ....	.....
2P.5.2	Pembangunan Madrasah di ....	Rp. ....	.....
2P.5.3	.....	Rp. ....	.....
2P.6	Pembangunan lain-lain	Rp. ....	.....
2P.6.1	.....	Rp. ....	.....
2P.6.2	.....	Rp. ....	.....
2P.6.3	.....	Rp. ....	.....
	J U M L A H	Rp. ....	.....

KEPALA DESA .....

( ..... )

## LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 19 Tahun 2000

Tanggal : 25 September 2000

Tentang : Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BENTUK PERATURAN DESA MENGENAI  
PERUBAHAN APB DESA

---

PERATURAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN SERANG  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... TAHUN  
ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa sesuai dengan Pasal ..... ayat ..... Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang .... dst ;  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang .... dst ;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang ..... dst ;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang ..... dst ;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang..... dst ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor ..... Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (BPD) ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor ..... Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor ..... Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Desa ;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor ..... Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;  
10. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran .....

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA .....

MEMUTUSKAN .....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... TAHUN ANGGARAN .....

## Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran ..... semula sebesar Rp. .... diperkirakan bertambah/berkurang Rp. .... sehingga menjadi Rp. ....
- (2) Rincian Penambahan/pengurangan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Desa ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran ..... Rp. .... diperkirakan bertambah/berkurang Rp. .... sehingga menjadi Rp. .... dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. ....  
bertambah/berkurang Rp. ....
  - b. Belanja Rutin setelah perubahan Rp. ....
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran IIa dan IIb Peraturan Desa ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Jumlah APBD Tahun Anggaran ..... setelah perubahan menjadi Rp. ....

## Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

( ..... )

LAMPIRAN I PERATURAN DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN .....  
 TANGGAL .....

CONTOH URAIAN PENERIMAAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1.1	Pos Sisa Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
1.2	Pos Penerimaan PAD	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
1.2.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
1.2.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
1.3	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
1.3.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
1.3.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
1.4.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
1.4.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
1.5	Pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
1.5.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
1.5.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
1.6	Pos Lain-lain Penapatan	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
1.6.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
1.6.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
	J U M L A H	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....

KEPALA DESA .....

( ..... )

LAMPIRAN IIa PERATURAN DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN .....  
 TANGGAL .....

CONTOH URAIAN BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
2R.1	Pos Belanja Pegawai	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.1.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.1.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.2	Pos Belanja Barang	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.2.1	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.2.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.3	Pos Biaya Pemeliharaan	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.3.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.3.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.4	Pos Biaya Perjalanan	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.4.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.4.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.5	Pos Belanja Lain-lain	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.5.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.5.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.6	Pos Pengeluaran tidak terduga	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
	J U M L A H	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....

KEPALA DESA .....

( ..... )

LAMPIRAN IIb PERATURAN DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN .....  
 TANGGAL .....

CONTOH URAIAN BELANJA PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2P.1.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2P.1.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2P.2	Pos Sarana Produksi	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.2.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.2.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2P.3	Pos Prasarana Pembangunan	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2P.3.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2P.3.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2P.4.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2P.4.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2P.5	Pos Prasarana Sosial	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2P.5.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2P.5.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2R.5.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2P.6	Pos Pengeluaran tidak terduga	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2P.6.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
2P.6.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....
	<b>J U M L A H</b>	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....

KEPALA DESA .....

( ..... )

## LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 19 Tahun 2000  
 Tanggal : 25 September 2000  
 Tentang : Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BENTUK PERATURAN DESA MENGENAI  
 PERHITUNGAN APB DESA

---

PERATURAN DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN SERANG  
 NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun anggaran ....., sesuai dengan pasal ..... ayat (..) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor .... Tahun ....., perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang .... dst ;  
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang .... dst ;  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang ..... dst ;  
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang ..... dst ;  
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang ..... dst ;  
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor ..... Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (BPD) ;  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor ..... Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ;  
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor ..... Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;  
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor ..... Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;  
 10. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .... Tahun Anggaran .....

Dengan .....

Dengan persetujuan  
BADAN PERWAKILAN DESA .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA ..... TAHUN ..... .

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .... Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp. ....

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa .... Tahun Anggaran adalah sebesar Rp. ....

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Anggaran Desa .... Tahun Anggaran adalah sebesar Rp. ....

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Anggaran Desa .... Tahun Anggaran adalah sebesar Rp. ....

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Anggaran Desa .... Tahun Anggaran adalah sebesar Rp. ....

Pasal 6

Uraian dan Pendapatan, belanja dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran I, IIa dan IIb Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

( ..... )

## LAMPIRAN I PERATURAN DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TANGGAL .....

## CONTOH URAIAN PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.1	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.2	Pos Penerimaan PAD	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.2.1	Tanah Kas Desa	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.2.2	Pasar/Kios Desa	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.2.3	Pemandian Umum	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.2.4	Obyek Rekreasi	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.2.5	Bangunan Milik Desa	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.2.6	Kekayaan Desa lainnya	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.2.7	Swadaya & Partisipasi Masy	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.2.8	Gotong Royong Masy	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.2.9	Pungutan Desa terdiri dari	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.2.9.1	Pungutan .....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.2.9.2	Pungutan .....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.2.10	Hasil Usaha Desa	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.2.10.1	Lumbung Desa	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.2.10.2	Pabrik Bata	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.2.10.3	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.3	Pos Pemberian Pemerintah Pusat	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.3.1	Tunjangan Penghasilan	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.3.3	Hadiah Lomba Desa	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.3.4	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.4	Pos Pemberian Pemerintah Propinsi	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.4.1	Penyisihan Penerimaan Pjk dan Retribusi Daerah Prop.	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Propinsi	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.4.3	Sumbangan dan Bantuan lain	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.5	Pos Pemberian Pemerintah Kabupaten	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pjk dan Retribusi Daerah Kab.	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Kab.	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.5.3	Sumbangan dan Bantuan lain	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.6	Pos lain-lain pendapatan	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.6.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.6.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.6.3	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
1.6.4	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
	J U M L A H	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....

KEPALA DESA .....

( ..... )

LAMPIRAN IIa PERATURAN DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN .....  
 TANGGAL .....

CONTOH URAIAN BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2R.1	Pos Belanja Pegawai	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.1.2	Penghasilan Sekr. Desa	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.1.5	Honor .....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.1.6	Honor .....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.1.7	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.2	Pos Belanja Barang	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.2.1	Pembiayaan ATK	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.2.2	Perlengkapan/peralatan kantor .....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.2.3	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.2.4	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.3	Biaya Pemeliharaan	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.3.1	Pengecatan Gedung Kantor	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.3.2	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa .....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.4	Pos Biaya Perjalanan	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.4.1	Perjalanan Dinas ke .....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.4.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.4.3	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.5	Pos Belanja lain-lain	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.5.1	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.5.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.5.3	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2R.6	Pos Pengeluaran Tidak Terduga	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
	J U M L A H	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....

KEPALA DESA .....

( ..... )

LAMPIRAN IIb PERATURAN DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN .....  
 TANGGAL .....

CONTOH URAIAN BELANJA PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.1.1	Gedung Kantor	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.1.2	Aula	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.1.3	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.1.4	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.2.1	Pembuatan Saluran Air	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.2.2	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.3.1	Pembangunan Jalan .....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.3.2	Pembangunan Jembatan ..	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.4.1	Pembangunan Pasar di ...	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.4.2	Pembangunan Kios di ...	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.4.3	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.5	Pos Prasarana Sosial	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.5.1	Pembangunan Mesjid di ..	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.5.2	Pembangunan Gereja di ...	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.5.3	.....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	
2P.6	Pembangunan lain-lain				
2P.6.1	Pembangunan ....				
2P.6.2	.....				
2P.6.3	.....				
	J U M L A H	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	.....

KEPALA DESA .....

( ..... )

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 19 TAHUN 2000  
TENTANG  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan hak otonomi penuh, sehingga bisa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam arti lain bahwa Desa memiliki sifat otonomi murni yang telah lama dikenal dan diakui oleh masyarakat dan berhak pula untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pengakuan dan kewenangan yang lebih luas kepada Desa membentuk Badan Perwakilan Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa sebagai perwujudan demokrasi.

Selain hal tersebut di atas, Desa juga memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan Desa, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.

Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, dalam pengaturan keuangan Desa perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai dasar hukum penyelenggaraan keuangan Pemerintahan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah merupakan landasan operasional Desa yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dan memuat angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan tanggal pendapatan dan pengeluaran keuangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Tahun Anggaran dimulai bulan Januari dan berakhir tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2) .....

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Huruf a dan b

Cukup Jelas

Huruf c

Penerimaan bantuan Pemerintah Kabupaten Serang adalah penerimaan yang berasal dari penyisihan Pajak dan Retribusi Kabupaten Serang dan penerimaan dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Serang.

Huruf d dan e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan Pinjaman Desa adalah pinjaman dalam rangka untuk kegiatan usaha Desa.

ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Belanja Pegawai adalah gaji, pembelian barang untuk kelengkapan pegawai seperti seragam dan atribut lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud Belanja Barang adalah pembelian barang untuk keperluan kantor, seperti Alat Tulis Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, dan barang cetakan yang diperlukan.

Huruf c

Yang dimaksud Belanja Pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan perawatan gedung atau perlengkapan kantor dan jalan desa.

Huruf d

Yang dimaksud Belanja Perjalanan Dinas adalah biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa ke Kabupaten dan Propinsi.

Huruf e

Yang dimaksud Angsuran Pinjaman adalah hutang yang harus dibayar berikut bunganya.

Huruf f

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran yang tidak termasuk belanja lain-lain dan sifatnya spontanitas.

ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b .....

Huruf b

Yang dimaksud dengan Prasarana Produksi adalah Gedung KUD, Tempat Pelelangan Ikan dan lainnya yang dapat menghasilkan ke Kas Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Prasarana Perhubungan adalah Jalan, jembatan dan Sungai.

Huruf d dan e

Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Apabila Peraturan Desa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga yang ditunjuk sebagai Kas Desa adalah lembaga yang ditunjuk sebagai lembaga keuangan seperti BRI, dan BPD sebagai tempat penyimpanan uang dan barang berharga lainnya milik Desa.

ayat (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak ada hubungan keluarga adalah :

1. Saudara kandung baik kakak maupun adik dari Kepala Desa, Pimpinan BPD dan Anggota BPD.
2. Saudara kandung baik kakak maupun adik dari suami maupun isteri Kepala Desa, Pimpinan BPD dan anggota BPD.

3. Ayah .....

3. Ayah kandung atau anak kandung dari Kepala Desa, pimpinan BPD dan anggota BPD.
4. Paman atau keponakan dari Kepala Desa atau isteri Kepala Desa, Pimpinan BPD dan anggota BPD.

Pasal 10

ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD hanya terhadap jalannya pelaksanaan APB Desa. BPD tidak dapat memeriksa secara langsung terhadap Bendaharawan Desa.

Pasal 16

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas